BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



2.1 Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pada masa penjajahan Belanda sebenarnya telah di kenal adanya pemungutan pajak. Pada waktu itu ditetapkan suatu pungutan pajak uang dikenal dengan nama "OORLOGSOVERGANGS BLASING", yang berarti "Pajak Peralihan".

Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang mengurus soal pemungutan pajak terhadap rakyat berdasarkan Undang – undang kkolonial Belanda pada masa itu.

Setelah Belanda menyerahkan kekuasaannya pada Jepang, maka pada tanggal 9 Maret 1942 "DE INSPECTIE FINANTIEN" diganti oleh suatu badan yang bernama "ZAIMUBA", dimana badan ini bertugas sebagai badan yang melakukan pungutan dan pemasukan pajak yang sama seperti yang dilakukan oleh Belanda, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, ZAIMUBA diganti menjadi "Inspeksi Keuangan" dan pindah ke Gedung Concordie yang sekarang adalah Gedung Merdeka yang bertempat di Jalan Asia Afrika Bandung. Pada saat Agresi Militer Belanda II tahun 1948, Kantor Inspeksi Keuangan yang saat itu bertempat di Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya, perpindahan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan taktik yang dijalankan oleh 2 kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang menjalankan taktik cooperative tidak bekerjasama dengan Belanda.
2. Kelompok yang menjalankan taktik non cooperative tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhir Agresi Militer, Kantor Keuangan yang berada di Tasikmalaya di non- aktifkan dan yang aktif bekerja hanyalah Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Bandung yang menggunakan sistem cooperative.

Pada tanggal 17 desember 1949, Kantor Inspeksi Keuangan di bagi menjadi 3 kantor hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979 tanggal 6 April 1979 yaitu :

1. Inspeksi Pajak Banfung Timur yang beralamat di Jalan Kiara condong No. 372 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

Kamudian pada bulan Oktober 1988, Kantor Inspeksi Pajak Bandung terjadi pemecahan kembali menjadi 3 kantor berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.01/1998 tanggal 19 Januari 1988, yaitu :

1. Kantor Inspersi Pajak Bandung Barat.
2. Kantor Inspeksi Panak Bandung Timur.
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah.

Dengan adanya reorganisasi pada Kantor Dirjen Pajak pada bulan April 1989 Kantor Inspeksi Pajak kemudian durubah menjadi Kaantor Pelayanan Pajak,

yaitu Kantor Palayanan Pajak Bandyng Timur, Kanror Palayanan Pajak Bandung Tengah dan Kantor Palayangan Pajak Bandung Barat.

Sehubungan dengan semakin benyaknya perusahaan, bsdan yang menjadi wajib pajak, maka pada bulan April 1994 dengn SK Menteri Keuangan No. 758/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1993 yang disempurnakan SK Menteri No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Palayanan pajak bertambah menjadi 5 wilayah yaitu :

1. Kantor Palayanan Pajak Bandung Tegal Lega
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara
5. Kantor Palayanan Pajak Bandung Cimahi

Adpun wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah wilayah Karees dan Kabupaten Sumedang.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai pembagian kerja dari suatu instansi atau perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang efektif.Dengan adanya struktur tersebut dapat terlihat bagaimana fungsi kerja atau hubungan kerja serta sampai sejauhmana tanggungjawab serta wewenang setiap aparaturorganisasi yang bersangkutan.

Struktur organisasi Bandung Timur didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI dan diatur berdasarkan Peraturan Surat Keputusan dari Direktorat Jendral Pajak No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut maka organisasi Kantor Palayanan terdiri dari 3 type, yaitu :

1. Type A
2. Type B
3. Type C

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees termasuk Kantor Palayanan Pajak type A. KPP Bandung Karees dipimpin oleh seprang Kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

- Mengamankan penerimaan pajak wilayah
- Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang dan kekuasaannya

Dalam sehari-harinya Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Ka. KPP) di bantu oleh :

1. Sub Bagian Tata Usaha yang Membawahi :
    - Urusan tata usaha kepegawaian
    - Urusan keuangan
    - Urusan rumah tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, membawahi :
    - Sub seksi data masukan dan keluaran
    - Sub seksi pangolahan data dan pengkajian informasi

- Sub seksi penggalian potensi dan ekstensifikasi pajak

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, membawahi :
   - Sub seksi pendaftaran wajib pajak
   - Sub seksi surat pemberitahuan pajak
   - Sub seksi ketetapan dan kearsipan pajak
4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, membawahi :
   - Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh perseorangan
   - Sublseksi verifikasi PPh perseorangan
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, membawahi :
   - Sub seksi pembayaran masa PPh badan
   - Sub seksi verifikasi PPh badan
6. Seksi Pemotongan da Pemungutan PPh, membawahi :
   - Sub seksi pengawasan pembayaranmasa pemotongan dan pemunutan PPh
   - Sub seksi verifikasi pemotongan dan penungutan PPh
7. Seksi pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPTL), membawahi :
   - Sub seksi PPN industri
   - Sub seksi PPN perdagangan
   - Sub seksi PPN jasa
   - Sub seksi verifikasi PPN dan PPTL
8. Seksi Penagihan, membawahi :

- Sub seksi piutang pajak
- Sub seksi penagihan

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, membawahi :
    - Sub seksi tata usaha penerimaan pajak dan restitusi
    - Sub seksi peksiliasi
    - Sub seksi keberatan PPh
    - Sub seksi keberatan PPN dan PPTL

2.3 Job Description di Kantor Paelayanan pajak Bandung Karees

Urian tugas di KPP Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bertugas menuelenggarakan kegiatan oprasional Direktorat Jendral Pajak dibidang perpajakan serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam angka melaksanakan kebijakan teknis.

Tugas dan tanggung jawab lainnya :

- Menyusun rencana kerja KPP sebagai pelaksanaan tugas
- Mengkoorsinasikan pelaksanaan kebijaksanaan pendapat dan serta penerimaan pajak
- Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, laporan kepehawaian, rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka melaksanakan tugas pokok

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan urusan Tata Usaha Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga.

Sub ini terdiri dari :

- Urusan Tata Usaha Kepegawaian, yang bertugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian
- Urusan Keuangan, yang bertugas melakukan urusan keuangan
- Urusan Rumah Tangga, yang bertugas melakukan urusan temah tangga dan perlengkapan kentor

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini mempunyai beberapa sub seksi, diantaranya :

- Sub seksi Data Masukan dan Keluaran

  Bertugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran format data masukan dan data keluaran

- Sub seksi Penggalian Potensi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

  Bertugas melakukan urusan penggalian potensi pajak serta mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak

- Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

  Bertugas melakukan pengurusan pemgolahan data dan penyajian informasi

4. Tata Usaha Pepajakan

Seksi ini mempunyai bebetapa sub seksi, diantaranya :

- Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak

Bertugas melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan prnyajian surat pemberitahuan

- Sub seksi Surat pemberitahuan Pajak

  Bertugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan pajak

- Sub seksi Ketetapan dan KearsipanWajib Pajak

  Bertugas melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearspan berkas wajib pajak

5. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Seksi ini mempunyai beberapa sub seksi, diantaranya :

- Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PajakPenghasilan Perseorangan

  Bertugas melakukkan urusan penaraa usahaan dan pengecekan surat pemberitahuan (SPT), serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa pajak penghasilan perseorangan

- Sub seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan

  Bertugas melakikan urusan pemantauan verifikasi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak dimasukkan surat pemberitahuan tahunan

6. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi ini mempunyai beberapa sub seksi, diantaranya :

- Sub seksi Pengawasan Paenbayaran Masa Pajak Penghasilan Badan

Bertugas melaksanakan pemantauan, penata usahaan, pembayaran masa, penyerahan dan penyusunan laporan efektiviras pembayaran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan

- Sub Verifikasi Pajak Penghasilan Badan

  Bertugas melaksanakan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa pajak penghasilan badan

7. Seksi Pemungutan dan Pemotongan

Seksi ini mempunyai beberapa sub seksi, diantaranya :

- Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh

  Bertugas melakukan urusan pemantauan, penata usahaan, pembyaran masa, penyerahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa

- Sub seksi Verifikasi Pemotongan dan Penumungutan PPh

  Bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahian masa dan tahunan pajak penghasilan keryawan, surat pemberitahuan masa pajak rekanan, sewa, bunga, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

8. Seksi PPN dan PTLL

Seksi ini terdiri dari :

- Sub seksi PPN dan Industri.

  Bertugas melakukan urusan penerimaan, penata usahaan dan pengecekan kena pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan pajak, masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor industri.

- Sub seksi PPN Perdagangan.

  Bertugas melakukan urusan penerimaan, penata usahaan dan pengecekan surat pemberitahuan pajak atau surat pemberitahuan masa penyerahan dan penyusunan laporan perkembangan pengusaha.

- Sub seksi PPN jasa dan PTLL

  Bertugas melakukan urusan penerimaan, penata usahaan, pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menata usahaan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan surat pemberitahuan masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak sektor jasa dan PTLL.

- Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL.

  Bertugas melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan mesa PPNN, PPnBM, PTLL, PKP yang terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.

9. Seksi Keberatan PPh Perseorangan.

Seksi ini terdiri dari :

- Sub seksi Keberatan PPh Perseorangan.

  Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan pajak penghasilan perseorangan.

- Sub seksi Keberatan PPh Badan dan Pemotongan dan Pemungutan Pajak.

  Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh badan dan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

- Sub seksi Keberatan PPN PTLL.

  Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, pajak penjualan atau barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.

- Sub seksi Penerimaan.

  Bertugas melakukan penerimaan keberatan yang diajuka oleh wajib pajak.

10. Seksi Penagihan

Seksi ini bertugas sebagai berikut :

- Melakukan tagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- Jumlah tenaga kerja pajak negara tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- Jenis dan jenjang jabatan tenaga pejabat penagihan pajak fegara diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

2.4 Aspek Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

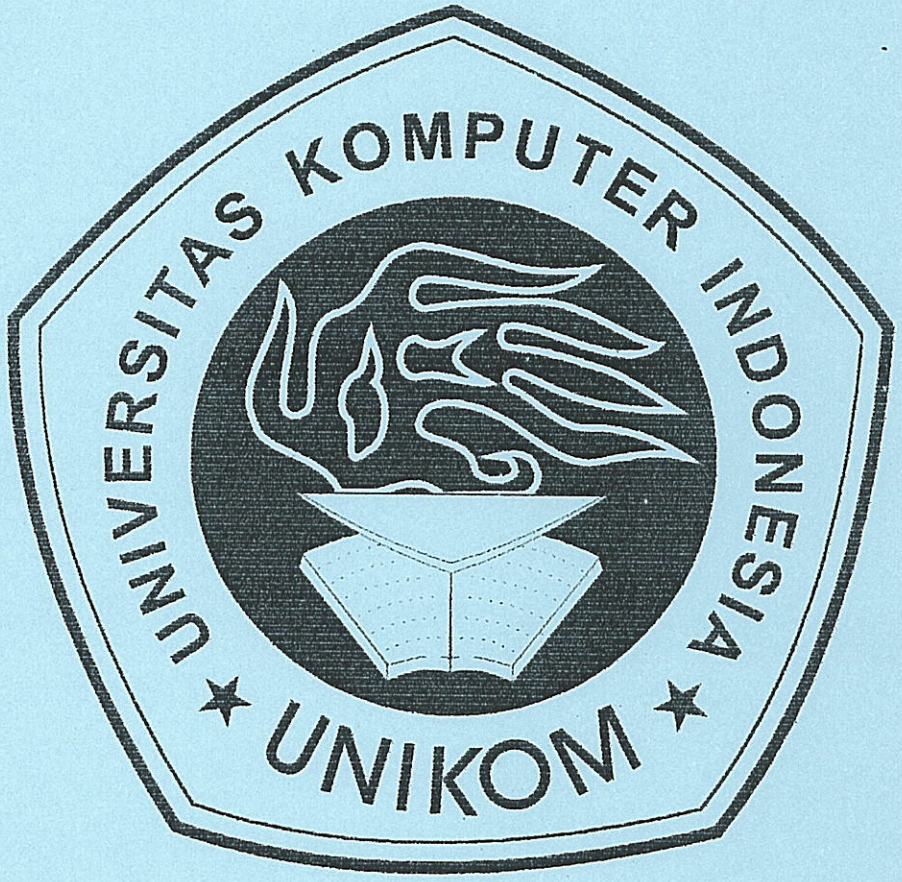
Kantor Pelayanan pajak mempunyai kedudukan sebagai pelaksana Direktorat Jendral Pajak, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Panam dan Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi
- Melakukan tata usaha pajak

- Melakukan penata usahaan dan mengecek surat pemberitahuan pajak serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Tidak Langsung Lainnya
- Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penuelesaian keberatan dan tertitudi PPh, PPn dan Pajak Tadk Lanfsung Lainnya
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan oprerasional pelayanan perpajakan di bedang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsing Launnya, dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan Dirjen Pajak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM